KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kebudayaan Landasan Manusia Pancasila
Tanggal : Sabtu, 15 Februari 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Kebudayaan Landasan Manusia Pancasila

Saat menerima gelar doktor kehormatan, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, ada setidaknya tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk merekayasa tumbuh kembang kebudayaan.

SEMARANG, KOMPAS — Kebudayaan yang berakar pada jati diri bangsa menjadi modal penting untuk menumbuhkan karakter manusia Indonesia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan berkeadilan.

Karakter manusia yang Pancasilais itulah yang dipandang mampu menghadapi tantangan global di depan, terutama menuju masyarakat era 5.0.

Dalam konteks tantangan itu, menurut Ketua DPR Puan Maharani, ada tiga hal setidaknya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk merekayasa tumbuh kembang kebudayaan sebagai modal dasar.

Tanpa rekayasa atau proses yang sistematis dalam menumbuhkembangkan kebudayaan Indonesia itu, mustahil untuk melahirkan generasi yang memiliki karakter Pancasila.

Puan menyampaikan pemikirannya tentang kebudayaan dan pembangunan manusia Pancasila tersebut saat menerima gelar doktor kehormatan (*honoris causa*) dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jumat (14/2/2020). Puan menerima gelar doktor kehormatan bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan manusia yang diusulkan Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara penganugerahan, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekanoputri, yang juga ibu Puan; Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla; Ketua MPR Bambang Soesatyo; dan sejumlah pimpinan DPR dan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Puan, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah ialah mereorientasi cara pandang melihat kebudayaan.

"Kebudayaan Indonesia harus dipandang, ditempatkan, dan difungsikan sebagai landasan untuk memanusiakan manusia Indonesia. Kebudayaan tidak semata-mata ditempatkan sebagai *klangenan*, identitas, simbol status, dan semacamnya, tetapi harus difungsikan untuk membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berkarya seluruh elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan," paparnya.

Kedua, negara harus diberdayakan untuk mampu menjamin pembangunan manusia Indonesia yang berkebudayaan Indonesia, bukan manusia Indonesia yang berkebudayaan lain. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

Ketiga, negara harus diberdayakan untuk menerapkan kebijakan publik di bidang kebudayaan. Kebijakan yang mampu menyentuh sendi-sendi paling dasar dalam kehidupan masyarakat, baik dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan etika, ekonomi, maupun sosial.

Puan mengatakan, penguatan kebudayaan nasional bukan berarti Indonesia anti-asing. Namun, itu menjadi sarana dasar untuk menyaring setiap kebudayaan yang masuk sehingga manusia Indonesia tidak tercerabut dari akarnya. Terlebih lagi dalam mengantisipasi kebudayaan transnasional yang saat ini berkembang sedemikian mudah dan cepat melalui teknologi informasi.

Rektor Undip Yos Johan Utama mengatakan, pemberian gelar untuk Puan melalui penilaian yang ketat dan proses panjang selama dua tahun.

Sejak Undip berdiri pada 1957, baru 13 kali gelar itu diberikan. Puan menjadi penerima gelar ke-13. Ia diberi penghargaan itu antara lain setelah melihat kinerjanya saat masih menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Keputusan memberikan gelar telah disetujui secara bulat oleh anggota senat akademik dan dewan profesor," kata Yos.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pemberian gelar untuk Puan diharapkan juga menjadi pemacu semangat untuk kian berhikmat dalam perbaikan kerja di DPR.

Hal senada dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Menurut dia, penghargaan adalah bentuk apresiasi atas kerja-kerja kebudayaan Puan. (REK)